

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keseriusan pemerintah dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan sudah terlihat sejak tahun 2003. Dimana upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan reformasi terhadap keuangan negara yang ditandai dengan terbitnya tiga paket UU dibidang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. UU No. 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. UU No. 15 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

Dan sebagai wujud pertanggungjawaban upaya tersebut yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Dimana hal ini diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan upaya yang nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik itu dari segi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.¹

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Dimana tujuan umum laporan keuangan pemerintah daerah adalah dengan menyajikan suatu informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang manfaatnya bagi para pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan diharapkan mempunyai kualitas dengan tingkat karakteristik yang memadai.

¹ Yuliani, Nadirsyah, Usman Bakar. “ *pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi akuntansi keuangan daerah dan peran intern audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*”. Dalam Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol 3. No : (2), Oktober 2019, h. 54-56.

Apabila laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai karakteristik yang memadai, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya, yang nantinya akan berdampak pada kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sumber daya.¹

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau aplikasi komputer. Menurut Halim dan Kusafi menyatakan bahwa SAKD terdiri dari empat prosedur akuntansi, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, selian kas dan aset. Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika tujuan dari penerapan sistem akuntansi keuangan dapat tercapai salah satunya pemerintah mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah yang berkualitas.

Dalam hal ini kapasitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan agar dapat melaksanakan, merencanakan dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Karena kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan dan tanggung jawab yang diberikan padanya dengan memiliki tiga indikator yaitu pendidikan, pelatihan/seminar, dan pengalaman yang memadai. Sedangkan menurut Yosefrinaldi dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) harus memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang memadai dengan didukungnya latar belakang pendidikan akuntansi, pelatihan/seminar, dan pengalaman dibidang keuangan/akuntansi sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas memadai akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami logika akuntansi disebabkan karena sumber daya manusia tidak dibekali dengan pendidikan,

¹ Arfan Ikhsan, et.al., *Akuntansi Sektor Publik* (Medan: Madenatera, 2018), H. 157.

pelatihan, dan pengalaman di bidang keuangan, maka terdapat pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.²

Selain sumber daya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan perbuatan memanfaatkan seperangkat alat yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Kewajiban Pemanfaatan Teknologi Informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (PP No. 56 Tahun 2005).

Teknologi informasi berperan penting dalam menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengambil suatu keputusan dalam organisasi atau instansi yaitu dalam pelaporan keuangan guna untuk mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Untuk menghasilkan informasi yang berkualitas maka diperlukan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

Fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Mulai dari berbagai tulisan atau dari *internet*. Nyatanya masih banyak ditemukan data-data yang tidak sesuai pada laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu juga masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Salah satu indikator kualitas laporan keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, salah satunya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan

² Yosefrinaldi, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah" (Skripsi Universitas Negeri Padang, 2013), h. 5.

Keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor pemerintah dimana dalam hal ini BPK memberikan 4 macam opini yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan pernyataan menolak member opini memberi pendapat (*disclaimer*). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada laporan keuangan pemerintah daerah ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat. Sampai saat ini pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua organisasi pemerintahan mampu memahami Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tersebut (SAKD).³

Perkembangan opini pada 34 PEMDA 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan

Tabel 1.1
Daftar Opini Pemda Se-Sumatera Utara 2017-2019⁴

No	Jenis Opini	Jumlah Pemda (IPD)					
		2017		2018		2019	
1.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	15	45 %	15	48 %	18	57 %
2.	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	16	48 %	14	45 %	16	50 %
3.	Tidak Wajar (TW)						
4.	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	3	12 %	3	12 %		
Jumlah		34	100 %	32	100 %	32	100 %

³ Rollis Ayu Ditasari dan M. Agus Sudraja. “ Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur” dalam Jurnal Akuntansi, Vol 4 No: (2), 2 Oktober 2020, h 105-106.

⁴ [http:// www.sumutbpk.go.id](http://www.sumutbpk.go.id). Diunduh pada tanggal 01 September 2021.

Dari hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) tahun 2019, hasil pemeriksaan atas seluruh laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2017 34 Pemda, BPK memberikan opini WTP atas 15 (45%), opini WDP atas 16 (48%), opini TMP atas 3 (12%). Dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah belum sepenuhnya melakukan prinsip akuntabilitas karena masih banyaknya persentase opini WDP dan masih terdapat opini TMP terhadap LKPD. Namun perkembangan opini terhadap 34 Pemda tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan dan meningkat lagi setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil opini audit, raihan yang didapatkan oleh pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan pada empat tahun terakhir mendapat opini audit yang diberikan oleh BPK adalah WTP (wajar tanpa pengecualian) yaitu sudah memenuhi syarat. Hasil Audit BPK Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tabel 1.2
Hasil Audit BPK Kabupaten Labuhanbatu Selatan⁵

No	Tahun	Hasil Audit
1	2015	WTP
2	2016	WTP
3	2017	WTP
4	2018	WTP

Meski begitu opini WTP bukan berarti benar tanpa pengecualian melainkan WTP artinya masih ada temuan-temuan yang masih harus ditindaklanjuti dan dicari solusinya. Sedangkan dalam pemerintah daerah masih terdapat kurangnya pemahaman instansi terhadap sistem akuntansi keuangan daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tersebut masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan uang publik. Penerapan

⁵ <http://www.bpksumut.go.id>. Diunduh pada tanggal 01 September 2021.

sistem keuangan tidak terlepas dari persepsi, wawasan, dan profesionalisme dari aparaturnya itu sendiri.

Dalam kapasitas sumber daya manusia masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam memahami akuntansi logika yang baik. Yaitu dengan terjadinya kekeliruan dan ketidaksesuaian terhadap laporan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan masih terjadinya tindak kecurangan. Kondisi pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah kurang baik, kurang memadai serta kurangnya ketepatan waktu. Dilihat dari aplikasinya pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan dan belum memahami sistem akuntansi itu sendiri. Sedangkan dalam peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang pada komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada pemerintah. Hasil dari penelitian tersebut menerangkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada waktu, lokasi penelitian dan dimensi. Perbedaan pada lokasi, penelitian terdahulu melakukan penelitian pada SKPD Pemko Medan sedangkan penelitian sekarang pada SKPD Kab. Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendapat peneliti bahwa sangat penting dilakukannya penelitian ini terjadi perbaikan untuk kedepannya. Penelitian ini juga memberi manfaat bagi pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), agar dapat memperbaiki kualitas laporannya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sehingga peneliti mengambil tema tentang **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber**

Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah yaitu

1. Kurangnya Pemahaman Instansi Pemerintah dalam memahami Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Kurangnya pemahaman dan penerapan logika akuntansi, akibatnya terjadi ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi di pemerintah daerah belum maksimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, penelitian ini tidak dilakukan pada proses pelaporan keuangan, namun ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada pengujian terhadap tiga faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya alam, pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

D. Perumusan Masalah

1. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten labuhanbatu selatan?
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten labuhanbatu selatan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten labuhanbatu selatan?

4. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten labuhanbatu selatan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari hasil penelitian ini antara lain:

- a) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- b) Untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- c) Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- d) Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten labuhanbatu selatan

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a) Mahasiswa/penulis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi.
- b) Bagi Peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan menjadi pandangan dan pembanding untuk penulisan skripsi selanjutnya yang berhubungan dengan skripsi ini.
- c) Bagi pemerintah daerah kabupaten labuhanbatu selatan

Sebagai bahan masukan bagi seluruh pegawai di SKPD pemerintah daerah kabupaten labuhanbatu selatan.

- d) Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan mengenai mengenai pengaruh kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, kfasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi.



